

IPTEKS SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN KAS PADA UPTD BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI DAN UKM DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Erika Zhavira Lasupu¹, Anneke Wangkar²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

email : erikazhav@gmail.com

ABSTRACT

Cash expenditure is the most important component in implementing development programs that will be carried out by the government. In cash expenditures the government has a system and procedures for managing and controlling financial expenditures. North Sulawesi Cooperative and SME Education and Training Center as regional technical implementers involved in cooperatives and SME education and training in North Sulawesi Province, of course the expenditure and receipt of cash must be in accordance with procedures stipulated by the government in the regulations per invitation law. Based on research conducted at the UPTD of the North Sulawesi Province Cooperative and SME Education and Training Center, the UPTD of the North Sulawesi Province Cooperative and SME Education and Training Center has effectively referred to the Minister of Home Affairs regulation Number. 59 of 2007. However, in its implementation there are still shortcomings, namely in the process of submitting SPP (UP-GU-TU-LS) without authorization of PPK-SKPD and some processes have a lack of attachments to complete submissions. The suggestions that can be given by researchers in implementing cash disbursement procedures at the UPTD of North Sulawesi Province Cooperative and SME Education and Training Centers must be in accordance with the applicable provisions but must be able to adjust if there is a change in regulation as a reference in regional financial management.

Keywords: Analysis, Application, System, Procedure, Expenditure, Cash

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara dengan aturan yang sangat terstruktur mengenai penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran yang di lakukan dengan benar dan sesuai ketentuan yang berlaku, akan membawa keuntungan dalam pembangunan Negara Indonesia. Seperti yang telah di atur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 berisi perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 berisi Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ada beberapa komponen dalam prosedur akuntansi meliputi prosedur akuntansi Kas masuk, kas keluar, dan Akuntansi Aset dan Akuntansi Selain Kas. Pengeluaran kas adalah prosedur yang penting dalam menjalankan pembangunan oleh pemerintah, oleh karena itu di butuhkan standar dalam sistem dan prosedur untuk pengeluaran kas. Tentunya, dalam hal ini UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UKM Daerah Prov. Sulawesi Utara dalam mengelola keuangannya harus menjalankan sistem dan prosedur yang sesuai untuk menghindari terjadinya penyelewengan dalam pembangunan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pemerintahan. Akuntansi Pemerintahan merupakan akuntansi yang di berlakukan dalam bidang pemerintahan. Akuntansi sektor publik merupakan bidang akuntansi pemerintahan yang menyediakan informasi kuantitatif pada suatu kegiatan yang bergerak dalam bidang jasa, khususnya yang berkarakteristik finansial dari entitas pemerintah

dengan tujuan membantu untuk mengambil keputusan ekonomi yang masuk akal dari berbagai pihak yang berkepentingan dari berbagai tindakan (Halim,2010).

Sistem Akuntansi Pemerintah. Adalah susunan dari prosedur, penyelenggara dalam menjalankan fungsi akuntansi, mulai dari langkah menganalisa transaksi hingga langkah penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Pengeluaran Kas. Merupakan catatan yang di buat untuk kegiatan pengeluaran kas yang di keluarkan dalam bentuk cek ataupun dalam bentuk uang tunai yang di peruntukkan lembaga pemerintahan.

Prosedur Pengeluaran Kas. Prosedur pengeluaran kas sangat di perlukan dalam setiap lembaga atau perusahaan guna meningkatkan tingkat efisiensi badan pemerintahan atau perusahaan. Akuntansi untuk instansi pemerintahan diwajibkan mengikuti SAP seperti yang telah tertuang dalam UU Nomor 1 tahun 2004 pasal 51 ayat 3,UU nomor 17 tahun 2003 pasal 2, dan PP nomor 24 tahun 2005. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pengeluaran kas dibagi jadi 2 bagian, yaitu: SIA pengeluaran kas menggunakan cek, dan SIA menggunakan sistem dana kas kecil.

3. METODE DAN TEKNIK PENERAPAN IPTEKS

3.1. Metode Penerapan IPTEKS

Metode ipteks yang di terapkan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

3.2. Teknik Penerapan IPTEKS

Teknik ipteks yang di terapkan adalah membandingkan antara sistem dan prosedur pengeluaran kas yang telah di terapkan oleh UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan prosedur yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

4. PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penerapan Ipteks

UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Koperasi dan UKM Daerah Prov.Sulut adalah UPTD di bidang pendidikan dan pelatihan koperasi dan UKM yang berada di bawah naungan Dinas Koperasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov.Sulawesi Utara berdasarkan PerDa Prov.Sulawesi Utara Nomor 3 tahun 2008 mengenai operasional dan cara kerja Dinas Koperasi dan UKM Prov.Sulawesi Utara yang kemudian di tuangkan dalam peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 89 Tahun 2008 berisi pembentukan UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UKM Daerah Prov.Sulawesi Utara memiliki tugas menyelenggarakan diklat yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat dan penunjang yang juga menjadi tugas dari dinas koperasi.

4.2. Pembahasan

Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Terdiri dari 4 yaitu:

1. SPP-UP meliputi:

- ringkasan dari SPP-UP yang di ajukan
- rincian dari SPP-UP yang di ajukan
- surat pengantar dari SPP-UP yang akan di ajukan
- salinan SPD.

2. SPP-GU meliputi:

- surat pengantar dari SPP-GU yang akan di ajukan
- ringkasan SPP-GU yang di ajukan
- rincian SPP-GU yang di ajukan
- surat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya

- salinan SPD
 - draft surat pernyataan yang harus di tanda tangani pengguna anggaran bahwa anggaran tersebut di gunakan sesuai tujuannya dan tidak akan menyeleweng.
 - lampiran lainnya yang di butuhkan
3. SPP-TU meliputi:
- surat pengantar dari SPP-TU yang akan di ajukan
 - ringkasan dari SPP-TU yang di ajukan
 - rincian dari SPP-TU yang di ajukan
 - salinan dari SPP-TU yang di ajukan
 - draft surat pernyataan yang harus di tanda tangani pengguna anggaran bahwa anggaran tersebut di gunakan sesuai tujuannya dan tidak akan menyeleweng.
 - lampiran lainnya yang di butuhkan
 - surat keterangan penjelasan penambahan UP; dan
 - lampiran lainnya yang di butuhkan
4. SPP-LS meliputi:
- surat pengantar dari SPP-LS yang akan di ajukan
 - ringkasan dari SPP-LS yang di ajukan
 - rincian dari SPP-LS yang di ajukan
 - lampiran lainnya yang di butuhkan

Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas meliputi:

1. *Akuntansi Pengeluaran Kas Uang Persediaan.* Ini di lakukan sekali dalam 1 tahun, guna mengisi tiap-tiap SKPD, meliputi:
 - penerbitan surat penyediaan dana
 - pengajuan surat permintaan pembayaran
 - permintaan surat permintaan membayar
 - penerbitan surat perintah pencairan dana
2. *Akuntansi Pengeluaran Kas Ganti Uang.* Adalah uang pengganti untuk uang yang telah di pakai sebelumnya, meliputi:
 - penerbitan surat penyediaan dana
 - prosedur pengajuan surat permintaan pembayaran uang persediaan
 - prosedur penerbitan surat perintah pencairan dana uang persediaan
 - prosedur pembelanjaan dana dan pembuatan surat pertanggung jawaban uang persediaan
 - prosedur pencatatan akuntansi uang persediaan
3. *Akuntansi Pengeluaran Kas Tambahan Uang Persediaan.* Jika ada pengeluaran dan ternyata saldo UP yang di miliki tidak mencukupi untuk biaya pengeluaran, maka akan di ajukan tambahan uang ke SKPD.
 - pengajuan SPP-TU
 - penerbitan SPMTU
 - penerbitan SP2D-TU
 - pembelanjaan dana dan pembuatan surat pertanggung jawaban TU
 - pencatatan akuntansi TU
4. *Akuntansi Pengeluaran Kas Langsung.* Adalah pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan jumlah yang telah di tetapkan sebelumnya.
 - prosedur penerbitan SPD
 - pengajuan SPP-LS
 - permintaan SPM LS
 - penerbitan SP2D LS

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Balai Pendidikan Dan Latihan Koperasi Dan UKM Daerah Prov.Sulawesi Utara yang bergerak di bidang pendidikan, pelatihan dalam mengembangkan SDM merupakan satuan kerja perangkat daerah pemerintah Prov.Sulawesi Utara yang menerapkan mekanisme pencatatan dan sistem pengelolaan keuangan secara sistematis sesuai prosedur yang berlaku sebagai salah satu tindakan pencegahan terhadap kecurangan dalam penggunaan dana. Berdasarkan ipteks yang di terapkan pada UPTD Balai Pendidikan Dan Latihan Koperasi Dan UKM Daerah Prov.Sulawesi Utara maka dapat disimpulkan bahwa prosedur dan sistem pengeluaran kas belanja yang dilakukan oleh UPTD Balai Pendidikan Dan Latihan Koperasi Dan UKM Daerah Prov.Sulawesi Utara sudah efektif, namun pada proses pelaksanaannya masih di dapati kekurangan ketika mengajukan Surat Permintaan Pembayaran.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah bahwa dalam melaksanakan Prosedur pengeluaran kas pada UPTD Balai Pendidikan Dan Latihan Koperasi Dan UKM Daerah Prov.Sulawesi Utara di haruskan mengikuti ketentuan yang telah di atur, namun harus dapat menyesuaikan jika terjadi perubahan regulasi sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam proses pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dan Pengelolaan keuangan yang mengacu UU yang berlaku dan tetap memperhatikan prinsip tertib, taat, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabilitas serta dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih memperhatikan keadilan, kepatuhan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bodnar dan Hopwood 2008, Diterjemahkan oleh Amir Yusuf dan Andi M. Tambunan, Sistem informasi Akuntansi. Salemba Empat. Yogyakarta
- Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Badan penerbit Indeks. Jakarta
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) 2016 Unit Pelayanan teknis Daerah (UPTD) Balai Pendidikan Dan Latihan Koperasi Dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara
- Lahay, Novita Olivia. 2013. Analisis Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA. 1(3), 476-601.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta.
- Mulyadi. 2013. Sistem Akuntansi. Salemba Empat, Edisi 3. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 Tentang Penyesuaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja
- Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- Republik Indonesia. 2007. SE:900743/BAKD. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2009. Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPKD dan Pemerintahan Daerah.
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta. Hal 5.